

VOL. 01

JULI 2025



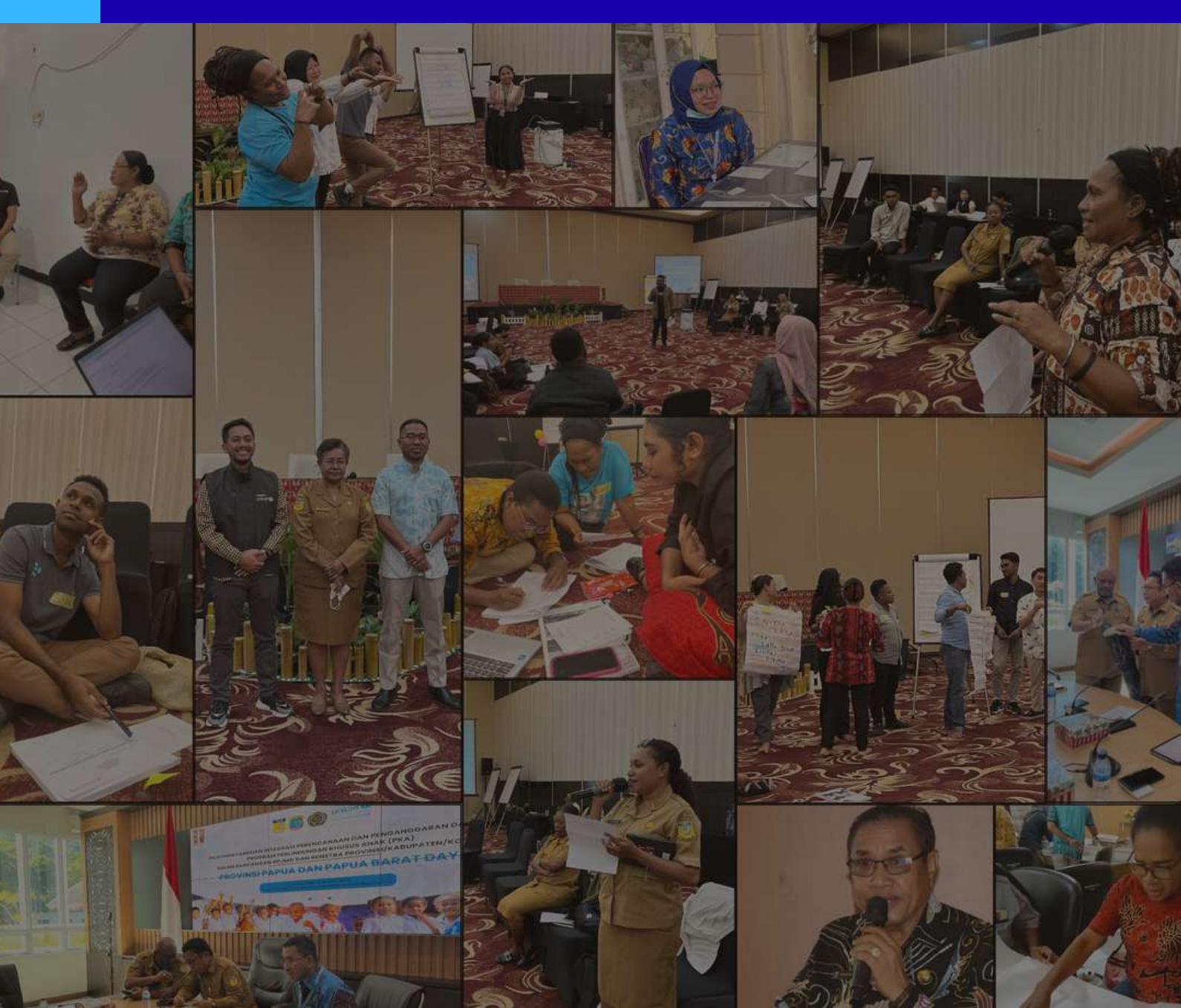
unicef
untuk setiap anak

LENSA HOPE PAPUA



**LIPUTAN BULANAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN ANAK TERPADU DI TANAH PAPUA**

**(HOLISTIC OUTREACH FOR PARENTING AND
EMPOWERING CHILDREN IN TANAH PAPUA -
HOPE PAPUA)**



PENGANTAR REDAKSI

Salam HOPE!

Edisi perdana buletin ini merekam berbagai capaian penting Program HOPE Papua selama bulan Juni 2025, yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat merupakan kunci dalam memperkuat sistem perlindungan dan pemberdayaan anak di Tanah Papua. Rangkaian kegiatan telah berhasil dilakukan seperti pelatihan integrasi perencanaan dan penganggaran daerah untuk program perlindungan khusus anak (PKA) dalam rancangan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD dan Renstra), workshop kolaborasi percepatan pencapaian kepemilikan dokumen kependudukan dan perbaikan data kesehatan Kabupaen Biak Numfor, sosialisasi sistem perlindungan anak di 2 kampung wilayah Kabupaten Sorong, pelatihan untuk fasilitator kesehatan mental remaja serta kunjungan pemantauan bersama.

Berbagai praktik baik bermunculan, seperti integrasi layanan pencatatan administrasi kependudukan di fasilitas kesehatan di Kabupaten Biak Numfor dan pembentukan fasilitator kesehatan mental remaja di Provinsi Papua dan Papua Barat Daya. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi, termasuk keterbatasan sumber daya dan hambatan administratif, direspons secara adaptif melalui koordinasi antarlembaga dan dukungan lintas sektor. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua Ibu Josefintje B. Wandosa: "Perubahan tidak harus besar di awal, yang terpenting adalah dimulai dan dikerjakan bersama."



HOPE PAPUA
(Holistic Outreach for Protecting and Empowering Children in Tanah Papua)

Program Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Terpadu di Tanah Papua

Tentang program HOPE
Program yang mendukung upaya pemenuhan hak anak terhadap perlindungan dan pemberdayaan melalui integrasi lintas sektor dan kolaborasi berbagai pihak di Tanah Papua.

Tujuan program
Memperkuat sistem perlindungan anak di Tanah Papua dan meningkatkan cakupan akta kelahiran melalui integrasi layanan kesehatan dengan catatan sipil

Durasi program
Mei 2025 - Desember 2025

KONTAK INFORMASI
Nursalim
0821-9976-5576
adenursalim@gmail.com
Rina Handayani
0821-9832-8288
derinahandayani090911@gmail.com
unimudasorong
https://kemitraan-
unicef.unimudasorong.ac.id/

Wilayah implementasi

Mitra pelaksana
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong



HOPE PAPUA
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN ANAK TERPADU DI TANAH PAPUA

TARGET PROGRAM

1. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam Sistem Perlindungan Anak (SPA) dalam program & anggaran, termasuk saat darurat
2. Pemberdayaan anak dan komunitas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak
3. Peningkatan kapasitas penyedia layanan perlindungan anak
4. Peningkatan akses pencatatan akta kelahiran melalui integrasi layanan kesehatan dan catatan sipil

PENGUATAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK
• 3 kabupaten/kota menyusun Rencana Aksi Perlindungan Anak (PaA) dengan anggaran indikator
• 80 staf pemda dan pemangku kepentingan memahami perencanaan dan penganggaran perlindungan khusus anak
• 2 kabupaten memperkuat tim darurat/kesiapsiagaan bencana dengan perlindungan anak

PEMBERDAYAAN ANAK & KOMUNITAS
• 30 remaja menjadi agen perubahan perlindungan anak
• 600 anak & 3.000 orang tua terdampak terkait norma positif dan perlindungan anak
• 3 kabupaten/kota mengadakan Dialog Komunitas untuk promosi norma sosial positif dalam melindungi anak

PENINGKATAN KAPASITAS PENYEDIA LAYANAN
• 80 penyedia layanan perlindungan anak terlatih manajemen kasus dan kesehatan mental
• 6 kampung membentuk mekanisme rujukan perlindungan anak
• 3 kabupaten/UPTD PPA mempunyai SOP Pencegahan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual
• Terbentuknya Pusat Pembelajaran Pekerja Sosial Perlindungan anak di Prov Papua

PENINGKATAN AKSES AKTA KELAHIRAN
• 5 Kab mempunyai SOP & mekanisme rujukan faiskes ke Dukcapil untuk pencatatan akta lahir
• 30 fasilitas kesehatan terhubung dengan Dukcapil untuk layanan integrasi
• 1.000 anak dibawah 5 tahun dapat akta kelahiran
• 9 Posyandu / kampung menggunakan spanduk Kampungku Rumahku (My Village My Home) untuk skrining akta & imunisasi

DAFTAR ISTILAH

No.	Singkatan/Istilah	Kepanjangan / Penjelasan
1	HOPE Papua	<i>Holistic Outreach for Parenting and Empowering Children in Tanah Papua</i>
2	PKA	Perlindungan Khusus Anak
3	RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
4	RENSTRA	Rencana Strategis
5	Ditjen Bina Bangda	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri
6	BAPPERIDA / BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah / Daerah
7	DPPPA / DP3AKB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / dan Keluarga Berencana
8	Dinsos P3A	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	DISDUKCAPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	PATBM	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
11	P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
12	Faskes	Fasilitas Kesehatan
13	SITANDUK RUSA / EMAS	Sistem Terintegrasi Pelayanan Kependudukan dan Rumah Sakit/Puskesmas – inovasi layanan akta kelahiran
14	HAT	<i>Helping Adolescents Thrive</i> – pelatihan fasilitator kesehatan mental remaja
15	JMV	<i>Joint Monitoring Visit</i> – kunjungan pemantauan lapangan
16	RAKORTEK	Rapat Koordinasi Teknis
17	UNIMUDA	Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
18	UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i> – Lembaga PBB yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak anak serta mendukung kesejahteraan anak dan ibu, terutama di negara berkembang.
19	NAPZA	Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
20	KIA	Kartu Identitas Anak
21	NIK	Nomor Induk Kependudukan
22	PAM GKI Klasik	Persekutuan Anggota Muda (PAM) GKI (Gereja Kristen Injili) di suatu Klasik



PADA EDISI INI

RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORTEK) DAERAH

5

**PEMBUKAAN PROGRAM HOPE DAN DIALOG PERLINDUNGAN ANAK
DI TANAH PAPUA**

6

**PELATIHAN PANDUAN INTEGRASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DAERAH PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (PKA) DALAM
RANCANGAN RPJMD DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

7

**WORKSHOP KOLABORASI PERCEPATAN PENCAPAIAN KEPEMILIKIAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PERBAIKAN DATA KESEHATAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

8

**SOSIALISASI SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DI KAMPUNG JEFLIO DAN
KAMPUNG KLASMELEK**

9

**TRAINING UNTUK FASILITATOR KESEHATAN MENTAL REMAJA:
MEMBANTU REMAJA BERKEMBANG (*HELPING ADOLESCENT TO
THRIVE / HAT*)**

10

**KUNJUNGAN PEMANTAUAN BERSAMA
(*JOINT MONITORING VISIT*) KABUPATEN JAYAPURA**

11

RAPAT KOORDINASI TEKNIS DAERAH

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (BANGDA) Kemendagri mengadakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) secara daring melalui Zoom bersama tiga provinsi di Tanah Papua, dengan jadwal Papua Barat Daya tanggal 14 Mei 2025, Papua Selatan tanggal 20 Mei 2025, dan Provinsi Papua tanggal 27 Mei 2025

Rakortek ini membahas upaya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pemenuhan hak, termasuk perlindungan anak di Tanah Papua. Kegiatan ini melibatkan Bappeda, dinas teknis, serta mitra pembangunan seperti UNICEF dan UNIMUDA Sorong, sebagai bagian dari komitmen bersama mewujudkan sistem perlindungan anak yang kuat dan berkelanjutan di Tanah Papua.





PEMBUKAAN PROGRAM HOPE DAN DIALOG PERLINDUNGAN ANAK DI TANAH PAPUA

Program HOPE (*Holistic Outreach for Parenting and Empowering Children in Tanah Papua*) resmi diluncurkan dalam sebuah kegiatan yang berlangsung di Jayapura, Provinsi Papua pada tanggal 3 Juni 2025.

Program ini bertujuan memperkuat sistem perlindungan anak dan mendukung pemenuhan hak-hak anak melalui pendekatan lintas sektor di wilayah Papua.

Pembukaan ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah, lembaga layanan anak, akademisi, serta mitra pembangunan yang berkomitmen memperkuat sistem perlindungan anak.



FOTO: DOK/HOPE PAPUA



FOTO: DOK/HOPE PAPUA

Di tempat berbeda, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, telah dilaksanakan pula advokasi tentang pelaksanaan Program Perlindungan Anak bersama Dinas Sosial P3A Provinsi Papua Barat Daya dan UPTD PPA Kabupaten Sorong. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas praktik baik, tantangan di lapangan, dan peluang kolaborasi dalam memperkuat sistem rujukan dan layanan kasus anak di wilayah masing-masing.

Kegiatan ini menegaskan pentingnya pendekatan *holistic*, berbasis komunitas, dan berbasis bukti dalam memastikan setiap anak Papua tumbuh dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan penuh harapan.



FOTO: DOK/HOPE PAPUA

PELATIHAN PANDUAN INTEGRASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (PKA) DALAM RANCANGAN RPJMD DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Sebagai bagian dari komitmen nasional untuk menjamin hak-hak anak, khususnya anak yang memerlukan perlindungan khusus, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda), Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, menyelenggarakan pelatihan teknis untuk mengintegrasikan isu Perlindungan Khusus Anak (PKA) ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Pelatihan ini dilaksanakan pada 3–4 Juni 2025 di Kantor Gubernur/Bapperida Provinsi Papua, dan diikuti oleh 59 peserta aktif dari berbagai instansi di tingkat Provinsi Papua dan Papua Barat Daya serta Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Kabupaten Sorong, seperti BAPPERIDA, BAPPEDA, DPPPA, dan Dinas Sosial. Kegiatan ini juga melibatkan kalangan akademisi dari Universitas Cenderawasih sebagai bagian dari penguatan sinergi multipihak.

Melalui pelatihan ini, peserta diperkuat kapasitasnya dalam menyusun RPJMD dan RENSTRA yang memuat program serta kegiatan yang berorientasi pada perlindungan anak. Materi pelatihan mencakup arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia dan pentingnya integrasi isu PKA dalam perencanaan pembangunan; Tinjauan terhadap implementasi PKA dalam dokumen RENSTRA Dinas PPPA di Papua dan Papua Barat Daya; Diskusi kelompok dan simulasi penyusunan matriks integrasi PKA dalam RPJMD dan RENSTRA.



Adapun hasil atau rencana aksi dari pelatihan ini adalah adanya komitmen untuk mengintegrasikan isu Perlindungan Khusus Anak (PKA) ke dalam dokumen RPJMD dan RENSTRA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat Daya. Kebijakan yang dihasilkan akan dimonitor secara berkala oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) sebagai bagian dari pengawasan perencanaan pembangunan daerah, dengan dukungan teknis dari tim UNICEF.

“Perumusan isu strategis harus diarahkan menjadi program strategis. Identifikasi permasalahan perlindungan anak di masyarakat perlu dituangkan secara nyata dalam dokumen perencanaan daerah.”
— Tomy Riski (Fasilitator dari Ditjen Bina Bangda, Kemendagri)

WORKSHOP KOLABORASI PERCEPATAN PENCAPAIAN KEPEMILIKIAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PERBAIKAN DATA KESEHATAN KABUPATEN BIAK NUMFOR



Ada sesuatu yang bermakna ketika para pemangku kepentingan dari berbagai instansi duduk bersama dalam satu ruangan—membawa mandat berbeda, namun mengarah pada satu tujuan: masa depan anak-anak Papua.

Workshop kolaborasi antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor pada 13 Juni 2025 bukan sekadar kegiatan teknis. Kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk menyatukan elemen-elemen sistem yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri. Bappeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pemerintah Kampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) saling berbagi perspektif, berdiskusi, dan mendengarkan.

Hal ini dilakukan karena fasilitas kesehatan adalah tempat pertama anak lahir, sehingga pencatatan adminduk seperti akta kelahiran dan nomor induk kependudukan (NIK) bisa dilakukan lebih cepat, mudah, dan efisien.

Bagi dukcapil, hal ini bermanfaat untuk memperluas jangkauan layanan dan mempercepat pencatatan adminduk. Sementara itu, bagi dinkes dan puskesmas, hal ini membantu menyediakan data anak yang lebih akurat untuk perbaikan data target Kesehatan anak, seperti imunisasi dan mendukung layanan kesehatan yang berbasis identitas resmi.

Meskipun terdengar administratif, sesungguhnya yang sedang dibahas adalah hak identitas anak: nama, keberadaan, dan pengakuan dalam sistem sosial dan negara. Tanpa akta kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), seorang anak menjadi tidak terlihat, bahkan dalam sistem yang bertujuan untuk melindunginya.

Untuk mendukung implementasi kerjasama, diperlukan MoU antar Dinas Kesehatan dan Dukcapil sebagai dasar komitmen dan koordinasi lintas sektor. Setelah itu, disusun SOP sebagai panduan teknis pelaksanaan di lapangan agar layanan berjalan efektif dan terarah. MoU dan SOP direncanakan akan diselesaikan dan difinalisasi pada awal juli 2025 sebagai langkah konkret menuju integrasi layanan yang berkelanjutan. Perubahan besar tidak selalu berawal dari pusat kota. Terkadang, ia tumbuh dari kampung-kampung kecil yang percaya bahwa identitas adalah hak dasar setiap anak, dan kerja sama adalah kunci menuju keadilan sosial dan perlindungan untuk setiap anak..



“Kegiatan ini adalah kolaborasi pemikiran dan hati. Semua harus bekerja dengan data yang nyata, penuh inovasi, dan semangat menjadi berkat.”

**— Plt. Asisten I Bupati Biak Numfor,
Fransisco Olla**

SOSIALISASI SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DI KAMPUNG JEFLIO DAN KAMPUNG KLASMELEK



FOTO: DOK/HOPE PAPUA

Sebagai bagian dari komitmen dalam memperkuat perlindungan anak berbasis komunitas, telah dilaksanakan Sosialisasi Sistem Perlindungan Anak di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya, yakni Kampung Jeflio dan Kampung Klasmelek, pada hari Sabtu, 21 Juni 2025.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak di tingkat kampung. Materi sosialisasi mencakup hak-hak anak, mekanisme pelaporan kekerasan, serta peran penting orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah kampung dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Dalam paparannya, Ibu Frida F. Gifelem, Kepala Bidang Perlindungan Hak-hak Anak, DP2KBP3A Kabupaten Sorong menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendorong setiap kampung untuk tidak ragu melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Saat ini, pemerintah daerah melalui DP2KBP3A telah menyediakan layanan pengaduan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Kepala Bidang mendorong masyarakat agar tidak diam jika melihat atau mengetahui kekerasan, karena satu laporan bisa menyelamatkan masa depan seorang anak.

Kegiatan ini diikuti oleh aparat kampung, PATBM kader kesehatan, tokoh agama, perwakilan anak, tokoh adat, serta guru SD. Pemerintah Kampung dan masyarakat menyambut kegiatan ini dengan antusias dan menyatakan dukungan untuk membentuk mekanisme perlindungan anak berbasis lokal sebagai bagian dari sistem layanan dasar kampung.

Di Kampung Jeflio, pemerintah kampung berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi tentang perlindungan anak secara lebih luas kepada seluruh masyarakat kampung dalam waktu dekat. Sementara itu, rencana aksi di Kampung Klasmelek adalah pengaktifan kembali PATBM serta pengalokasian dana kampung untuk mendukung kegiatan dan operasional pengurus PATBM. Selain itu, PATBM akan melakukan sosialisasi langsung kepada anak-anak di sekolah dasar sebagai bentuk edukasi dini terkait hak anak dan perlindungan dari kekerasan.



FOTO: DOK/HOPE PAPUA



FOTO: DOK/HOPE PAPUA

TRAINING UNTUK FASILITATOR KESEHATAN MENTAL REMAJA: MEMBANTU REMAJA BERKEMBANG (HELPING ADOLESCENT TO THRIVE / HAT)

Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat Daya menyelenggarakan Pelatihan bagi Fasilitator Kesehatan Mental Remaja – *Helping Adolescent Thrive (HAT)* di Jayapura pada tanggal 23–25 Juni 2025 sebagai bagian dari penguatan sistem perlindungan anak di wilayah tersebut.



Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respon atas pentingnya dukungan terhadap kesehatan mental remaja dan perlindungan psikososial di tingkat lokal. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membentuk calon fasilitator kesehatan mental remaja yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam memfasilitasi materi kesehatan mental.

Pelatihan diikuti oleh 26 peserta dari berbagai unsur instansi pemerintahan dan organisasi masyarakat. Peserta terdiri dari perwakilan Pemerintah Daerah (Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Kota dan Kabupaten Jayapura, serta Kabupaten Sorong), perwakilan kelompok remaja (Forum Anak Papua, Forum Anak Kota Jayapura, IYFP, FIM), lembaga sosial masyarakat dan keagamaan (PAM GKI Sentani, BGTK, PGGK, YNS) dan Perwakilan Universitas Cenderawasih.



Kegiatan diawali dengan pembukaan dan pengenalan, dilanjutkan pembahasan modul HAT dan teknik fasilitasi. Peserta mendalami topik seputar masa remaja, kesehatan mental, pengelolaan emosi, serta strategi koping. Sesi interaktif mencakup materi kekuatan diri, *self-talk* positif, pengambilan keputusan aman terkait *Napza*, keterampilan komunikasi, dan relasi yang sehat. Setiap sesi diselingi diskusi dan refleksi.

Peserta dipilih berdasarkan kriteria usia 20–40 tahun, memiliki pengalaman fasilitasi anak/remaja, dan mendapat persetujuan dari lembaga asal. Seluruh peserta menyatakan komitmen menjadi fasilitator kesehatan mental remaja di wilayah masing-masing.

Melalui pelatihan ini, telah terbentuk tim fasilitator regional yang memahami materi HAT, memiliki keterampilan fasilitasi yang kuat, serta memiliki komitmen untuk mempromosikan kesadaran kesehatan mental remaja di komunitas masing-masing. Sebagai tindak lanjut pelatihan, masing-masing unit atau perwakilan berkomitmen untuk mengintegrasikan muatan materi pelatihan ke dalam kegiatan dan program unit masing-masing serta melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan. Hal ini menjadi pijakan awal dalam memperluas intervensi promosi kesehatan mental bagi remaja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.



"Jangan pernah ragu untuk mengungkapkan apa yang kalian rasakan dan alami. Ceritakanlah kepada orang terdekat yang kalian percaya dan yang bisa menerima kalian sepenuhnya."

– Perwakilan Persekutuan Anggota Muda (PAM) GKI (Gereja Kristen Injili) Klasik Sentani, Stenli R. Bouway

KUNJUNGAN PEMANTAUAN BERSAMA (JOINT MONITORING VISIT) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DI PROVINSI PAPUA



Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Bapperida bersama OPD lintas sektor melakukan kunjungan pemantauan bersama ke program dukungan Unicef untuk pemenuhan hak anak di Kabupaten Jayapura pada tanggal 26-27 Juni 2025. Tujuan kunjungan ini adalah untuk meninjau pelaksanaan program pemenuhan hak anak, kolaborasi antara pemerintah daerah Bersama Unicef. Kegiatan ini dilakukan Bersama OPD lintas sektor karena memerlukan kolaborasi berbagai pihak agar layanan lebih holistic, saling mendukung, dan tepat sasaran bagi anak dan keluarga ditingkat akar rumput.

Salah satu program yang dipantau bersama adalah dukungan Unicef untuk program peningkatan cakupan adminduk melalui integrasi layanan adminduk di fasilitas kesehatan melalui program sistem terintegrasi pelayanan kependudukan dan rumah sakit (SITANDUK RUSA) dan sistem terintegrasi pelayanan kependudukan, rumah sakit dan puskesmas (SITANDUK RUSA EMAS). SITANDUK RUSA adalah salah satu praktik baik dari Kabupaten Jayapura yang memberikan layanan dengan memudahkan orang tua untuk mendapatkan akta kelahiran dan pencatatan kependudukan sejak bayi lahir langsung dari rumah sakit tanpa harus ke kantor Dukcapil yang dikembangkan sejak tahun 2023. Selanjutnya tahun 2024 diluncurkan versi EMAS dengan memperluas layanan ke Puskesmas.

Program ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan akta kelahiran, integrasi data antara fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan dan Disdukcapil serta meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bayi baru lahir yang merupakan hak dasar anak.

Tim Pemantau mengunjungi RSUD Yowari dan Puskesmas Harapan untuk melihat langsung pelaksanaan program peningkatan cakupan akta kelahiran yang terintegrasi dengan layanan kesehatan.

Tim melakukan wawancara bersama pihak administrasi dan jajaran pimpinan serta tenaga kesehatan terkait di fasilitas kesehatan tersebut. Selain wawancara, tim pemantau juga memeriksa alur layanan yang telah berjalan dalam mendukung akses identitas anak. Kunjungan ini menjadi bagian dari evaluasi keterlibatan fasilitas kesehatan dalam mendukung hak anak atas identitas melalui kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil observasi pemantauan SITANDUK RUSA di RSUD Yowari mempermudah pencatatan akta lahir, namun masih terkendala proses pendataan dan SDM, Dukcapil berencana akan menempatkan admin khusus pencatatan. Sementara, SITANDUK RUSA EMAS berjalan efektif dan akan diperluas ke kecamatan lain.

Selain kunjungan ke fasilitas kesehatan, Unimuda bersama Unicef juga melakukan kunjungan pemantauan di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) Kabupaten Jayapura. Di P2TP2A, tim melakukan diskusi tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kunjungan ini menyoroti pentingnya kerjasama antar instansi dalam memberikan perlindungan dan pendampingan yang tepat bagi anak korban kekerasan.

Di hari berikutnya, dilakukan diskusi bersama pekerja sosial dan kelompok anak muda yang ada di Kabupaten dan Kota Jayapura. Para pekerja sosial dari provinsi, kota, dan kabupaten berbagi pengalaman dan tantangan dalam mendampingi anak di lapangan. Diskusi ini menjadi wadah untuk menyampaikan masukan dan memperkuat peran pekerja sosial dalam layanan perlindungan anak.

Forum Anak dan komunitas remaja berdiskusi bersama tim pemantau tentang partisipasi anak dalam pembangunan. Mereka menyampaikan harapan agar suara anak lebih didengar dan dilibatkan dalam kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak anak.



HOPE PAPUA

(Holistic Outreach for Parenting and Empowering Children in Tanah Papua)

Program Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Terpadu di Tanah Papua

adalah program kemitraan antara Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (UNIMUDA) dengan UNICEF yang mendukung upaya pemenuhan hak anak terhadap perlindungan dan pemberdayaan melalui integrasi lintas sektor dan kolaborasi berbagai pihak di Tanah Papua.

Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Tanah Papua dan meningkatkan cakupan akta kelahiran melalui integrasi layanan kesehatan dengan catatan sipil.

Program HOPE Papua bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Forum Anak dan Komunitas Remaja, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Adat, Organisasi Agama, Pekerja Sosial, Kampung, dan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Selatan.

Redaksi:

Rina Handayani



unimudasorong
unimuda_unicef



adennursalim@gmail.com



0821-9976-5576 (Nursalim)



kemitraan-
unicef.unimudasorong.ac.id/

Kontributor:

Fitri Indayani

Elizabeth Bukorpioper

Maryana Binsaneman Urbasa

Ignasius Buu

Novita Situmorang

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Kelurahan Mariat Pantai,

Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Indonesia, 98444